RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
(RANKHIR RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. GOR NO. 8 BLORA TELP./FAX. (0296)533191
BLORA - 58219

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

(RANKHIR RENJA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BLORA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Blora untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Renstra dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blora yang tertuang Ranwal RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai acuan perencanaan perangkat daerah oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora pada umumnya.

Blora, 2024
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PMD

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720623 199101 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-7
1.3 Maksud dan Tujuan I-10
1.4 Sistematika Penulisan I-10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TH LALU . II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masy II-22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah III-11
3.3 Program dan Kegiatan III-17
BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH . IV-1
4.1 Program dan Kegiatan IV-1
BAB V PENUTUP V-1

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR : 050 / / 2024
TANGGAL :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terkahir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan Rankhir Renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

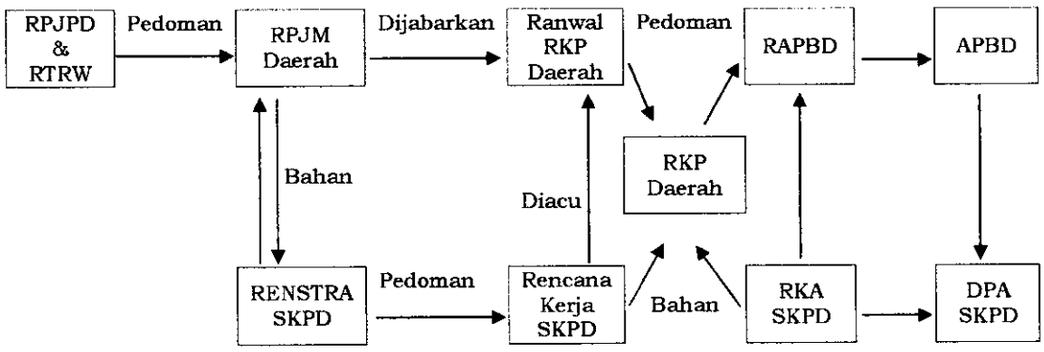

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora adalah Dinas dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan desa; Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan ketatausahaan dinas, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah serta program yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Blora sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD 2025;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berkewajiban juga menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan;
2. Melakukan review Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah;
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik di tingkat kebijakan ataupun operasional;
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025;
5. Merumuskan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan;
6. Merumuskan usulan pagu indikatif dan prakiraan maju;
7. Menyusun dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
8. Melakukan review hasil Musrenbang;
9. Membahas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Forum Perangkat Daerah;

10. Menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan Musrenbang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ini dapat menentukan rencana arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global.

Selanjutnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025, dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 adalah sebagai dokumen awal Perencanaan Pembangunan yang dapat memberikan arahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam Pelayanan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 ini disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2023 sebesar Rp. 14.680.000.000,- dengan capaian realisasi pada Akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 14.320.214.267,- dengan Prosentase 97,55%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2023 hampir semua Program/Kegatan/Sub Kegiatan Target Indikator Kinerjanya tercapai. Semua Target Indikator Kinerja Baik Program, kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagian besar dapat tercapai meskipun terdapat juga penyerapan anggarannya belum maksimal. Realisasi Target program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 yang tidak atau belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   a. Indikator Prosentase Desa meningkat stratanya
      Capaian Kinerja Indikator Program ini mencapai 5,90 % (realisasi yang dicapai 16 Desa yang meningkat stratanya) dari Target 7,38 % (target 20 Desa yang meningkat stratanya). Kategori Desa diukur melalui Indeks Desa Membangun dengan Kategori Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, berkembang, Maju, dan Mandiri. IDM Tahun 2023 untuk Status Desa Mandiri 4 Desa, Status Desa Maju 34 Desa, Status Desa Berkembang 226 Desa, dan Status Desa Tertinggal 7 Desa.
   b. Indikator Prosentase BUMDes berkembang dan Maju
      Capaian Kinerja Indikator program ini mencapai 6,80 % dari Target 8,47 %. Di tahun 2023 Jumlah BUMDes di Kabupaten Blora sudah mencapai 270 BUMDes dengan tingkatan Klasifikasi Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Sedangkan untuk BUMDesMa mencapai 24 BUMDes bersama LKD (UPK Eks. PNPM bertransformasi).

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran (target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan terpenuhi) dengan prosentase realisasi anggaran diatas 99 % adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

   a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 % dari Target 271 Dokumen Realisasi 271 Dokumen. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,76 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.374.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 3.366.061.294,-.

   b. Penyelenggaraan Pemiihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
   Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 107 % dari Target 27 Laporan Realisasi 29 Laporan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,47 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 102.500.000,- Realisasi Anggaran Rp. 101.955.000,-.

   c. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
   Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100 % dari Target 16 Dokumen Realisasi 16 Dokumen. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,96 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 19.991.000,-.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum
   - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota
     a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

        Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 4 Dokumen dari Target 4 Dokumen. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,26 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 23.605.220,- Realisasi Anggaran Rp. 23.430.220,-
     b. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

        Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 1 Laporan dari Target 1 Laporan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,98 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 23.040.000,- Realisasi Anggaran Rp. 23.035.000,-

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

        Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 3 Dokumen dari Target 3 Dokumen. Hasil yang dicapai adalah Jumlah dokumen perencanaan PD. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 100 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 500.000,- Realisasi Anggaran Rp. 500.000,-.
     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

        Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 7 Laporan dari Target 7 Laporan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,20 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 500.000,- Realisasi Anggaran Rp. 496.000,-.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 3 Dokumen dari Target 3 Dokumen. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 100 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 42.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 42.000.000,-.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 8 Paket dari Target 8 Paket. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,80 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 4.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 3.991.800,-

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 5 Paket dari Target 5 Paket. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,89 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 6.992.000,-

c. Penyediaan bahan logistik kantor

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 5 Paket dari Target 5 Paket. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,97 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 241.600.000,- Realisasi Anggaran Rp. 241.532.800,-

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 5 Paket dari Target 5 Paket. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,80 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 21.200.000,- Realisasi Anggaran Rp. 21.157.000,-

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
     Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 5 Unit dari Target 5 Unit. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,89 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 28.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 27.970.000,-

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah
  a. Penyediaan jasa surat menyurat
     Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 12 Laporan dari Target 12 Laporan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 100 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 7.000.000,-
  b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 5 Laporan dari Target 5 Laporan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,99 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 26.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 25.998.800,-

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  a. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
     Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 10 Unit dari Target 10 Unit. Hasil yang dicapai adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,96 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 10.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 9.995.700,-

b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 2 Unit dari Target 1 Unit. Hasil yang dicapai adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 100 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 27.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 27.000.000,-

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 30 Unit dari Target 30 Unit. Hasil yang dicapai adalah Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,90 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 128.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 127.876.917,-

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang direncanakan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama antar Desa :
   - Indikator Program adalah Prosentase Kerjasama antar desa yang terfasilitasi mencapai 100% dari Target 100%
   - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa

     Capaian Indikator kinerja kegiatan ini mencapai 4 Desa dari target 3 Desa, dengan Indikator Kinerja Kegiatan adalah Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar Desa.

2. Program Penataan Desa
   - Indikator Program adalah Prosentase Kegiatan pembangunan desa yang terselenggara dengan baik mencapai 100% dari Target 100%
   - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

     Capaian Indikator Kinerja kegiatan ini mencapai 182 Desa dari Target 100 Desa, dengan Indikator Kinerja Kegiatan adalah Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
  Capaian kinerja sub kegiatan ini 257 Unit dari Target 100 Unit. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi). Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 97,73 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 4.872.400.000,- Realisasi Anggaran Rp. 4.761.660.023,-

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   - Capaian Indikator Program :
     a. Prosentase Desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik, mencapai realisasi 100% dari Target 80%;
     b. Prosentase BUMDes berkembang dan maju, mencapai realisasi 6,80% dari Target 8,47%;
     c. Prosentase Desa Meningkat Stratanya, mencapai realisasi 5,90% dari Target 7,38%;
     d. Prosentase Produk Hukum tentang Desa yang ditetapkan, mencapai realisasi 100% dari Target 100%.
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Capaian Indikator Kinerja Kegiatan mencapai 271 Desa dari Target 271 Desa.
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemiihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
     Capaian kinerja sub kegiatan ini 29 Laporan dari Target 27 Laporan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 99,47 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 102.500.000,- Realisasi Anggaran Rp. 101.955.000,-
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
     Capaian kinerja sub kegiatan ini 40 Laporan dari Target 10 Laporan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 92,58 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 13.886.500,-

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  Capaian kinerja sub kegiatan ini 51 Desa dari Target 50 Desa. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Profil Desa. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 88,66 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi Anggaran Rp. 26.597.000,-

4. Program Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
   - Capaian Indikator Program
     a. Prosentase PKK Desa Aktif, mencapai realsiasi 100% dari Target 100%;
     b. Prosentase Posyandu Aktif, mencapai realisasi 100% dari Target 100%;
     c. Prosentase Posyantek yang menghasilkan Produk TTG, mencapai realisasi 72,47% dari Target 52,94%.
   - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga adat Tingkat daerah Provinsi, Capaian Indikator Kinerja Kegiatan mencapai 75 Desa dari Target 75 Desa.
   - Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
     Capaian kinerja sub kegiatan ini 4 Dokumen dari Target 3 Dokumen. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 97,73 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,-. Realisasi Anggaran Rp. 14.659.000,-
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
     Capaian kinerja sub kegiatan ini 90 Dokumen dari Target 35 Dokumen. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 94,19 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 21.110.000,-. Realisasi Anggaran Rp. 19.883.000,-

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  Capaian kinerja sub kegiatan ini 16 Lembaga dari Target 5 Lembaga. Hasil yang dicapai adalah Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya. Anggaran yang di capai dengan Prosentase Anggaran 94,19 % dan didukung dengan Jumlah Anggaran Rp. 59.585.000,-. Realisasi Anggaran Rp. 56.113.457,-

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora belum semua memenuhi target kinerja program/kegiatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program/kegiatan karena program/kegiatan tersebut pelaksanaanya belum/tidak sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Untuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

   Adapun faktor penghambat pencapaian target adalah sebagai berikut :

   - Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
   - Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.
   - Masih minimalnya anggaran dari tiap Sub Kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan menjadi kurang optimal.
   - Kurangnya Koordinasi dalam melaksanakan kegiatan dan perbedaan pemahaman antar Desa.

- Mundurnya/terbenturnya jadwal kegiatan antar bidang satu dengan yang lainya.

2. Faktor penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
3. Faktor–faktor penyebab program dan kegiatan yang pencapaiannya melebihi target adalah karena adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal tahun 2023 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian disesuaikan kembali Program Kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan. Maka terjadi Perubahan Indikator kinerja dan target capaian program kegiatan Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan Kondisi yang ada.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program / kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2023.
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
3. Efisiensi alokasi belanja.

4. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (Tahun berjalan) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora dapat kita lihat pada Tabel 2.1 (dalam excel) berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Blora

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10 = (5+7+9)	(11 = 10 / 4)
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**13**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	**13**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	**13**	**02**	**2**	**01**		**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA**	**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa**	**100**	**271**	**100**	**182**	**182%**	**100**	**553**	**553%**
2	13	02	2	01	06	Fasiltasi Sarana dan Prasarana	Prosentase Desa yang difasilitasi dan dimonitoring yang menerima Bantuan Keuangan Provinsi dan Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa		100%					100%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	400		100	257	257%	100	357	89%
2	**13**	**03**				**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	**13**	**03**	**2**	**01**		**KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA**	**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**15**	**6**	**3**	**4**	**133%**	**3**	**13**	**87%**
2	13	03	2	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan		1					1	
							Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4		1	1	100%	1	2	50%
2	13	03	2	01	01	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Prosentase Kerjasama antar desa		20					20	
							Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	4		1	1	100%	1	2	50%
2	13	03	2	01	02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Prosentase kerjasama antar desa dengan pihak ketiga		20					20	

							Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4		1	1	100%	1	2	50%
2	**13**	**04**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik**	**100%**	**100%**	**80%**	**100%**	**125%**	**85%**	**285%**	**285%**
							Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**13.56%**	**8.98%**	**8.47%**	**6.80%**	**80%**	**10.17%**	**26%**	**181%**
							Prosentase Desa meningkat stratanya	**22.88%**	**6.27%**	**7.38%**	**5.90%**	**80%**	**11.81%**	**24%**	**105%**
							Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	**13**	**04**	**2**	**01**		**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**271**	**271**	**271**	**271**	**100%**	**271**	**813**	**300%**
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		271					271	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271		271	271	100%	271	542	200%
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang ditetapkan dan terfasilitasi kepada Desa		6					6	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8		8	8	100%	8	16	200%
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes		271					271	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271		0	0	0%	271	271	100%
3	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dan dimonitoring yang menerima Bantuan Keuangan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHPR, dan Bankeu Desa Award		271					271	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	271		271	271	100%	271	542	200%
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa		271					271	

							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271		271	271	100%	271	542	200%
3	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi		0					0	
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	100		0	0	0%	0	0	0%
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes, BUMDes Bersama dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan		58					58	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	160		40	40	100%	40	80	50%
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	269	0	27	29	107%	0	29	927.59%
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		100					100	
							Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	35		10	40	400%	10	50	143%
2	13	04	2	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang telah menyusun Profil Desa		56					56	
							Jumlah Dokumen Profil Desa	221		50	51	102%	50	101	46%
02	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Prosentase terpenuhinya informasi yang akurat dan mudah di Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa		100					100	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	271		271	271	100%	271	542	200%
02	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Prosentase penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa		100					100	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	64		16	16	100%	16	32	50%
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mendapatkan pembinaan		0					0	
							Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271		0	0	0%	0	0	0%

2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen penetapan dan penegasan batas desa		0					0	
							Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	4		0	0	0%	0	0	0%
2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Prosentase PKK Desa aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
							Prosentase Posyandu Aktif	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
							Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**88.24%**	**58.82%**	**52.94%**	**76%**	**144%**	**84.71%**	**200%**	**227%**
2	**13**	**05**	**2**	**01**		**KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**90**	**75**	**75**	**75**	**100%**	**80**	230	**256%**
2	13	05	2	01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pembentukan Satgas Pelestarian Adat		16					16	
							Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12		3	4	133%	3	7	58%
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan dan KPSPAM Desa		14					14	
							Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	158		35	90	257%	35	125	79%
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang terintegrasi		3					3	

							Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	20		5	16	320%	5	21	105%
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Usaha ekonomi Produktif perempuan yang terlatih		4					4	
							Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	16		4	4	100%	4	8	50%
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah terfasilitasinya pemasyarakatan TTG dan pembentukan Posyantek		32					32	
							Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	72		35	35	100%	45	80	111%
	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan BBGRM		1					1	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5		1	1	100%	1	2	40%
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Tim PKK Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan Kegiatan Program Pokok PKK		94%					94%	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	25		5	5	100%	5	10	40%
2	**13**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	**13**	**01**	**2**	**01**		**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		3					3	
							Jumlah dokumen perencanaan PD	15		3	3	100%	3	6	40%
2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		7					7	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35		7	7	100%	7	14	40%

2	**13**	**01**	**2**	**02**		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tepenuhinya gaji dan tunjangan ASN/PNS		12					12	
							Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147		30	40	133%	30	70	48%
2	13	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya pelaksanaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN		12					12	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15		3	3	100%	3	6	40%
2	**13**	**01**	**2**	**06**		**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase pemenuhan administrasi umum pada PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang diadakan		5					5	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	41		8	8	100%	8	16	39%
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		7					7	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25		5	5	100%	5	10	40%
2	13	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		5					5	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	34		5	5	100%	8	13	38%
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Bahan Logistik Kantor		12					12	
							Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	25		5	5	100%	5	10	40%
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Pemenuhan barang cetakan dan Penggandaan		12					12	
							Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25		5	5	100%	5	10	40%
2	13	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Pemenuhan Bahan Cacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12					12	
							Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	15		3	3	100%	3	6	40%
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12					12	

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	960		180	180	100%	200	380	40%
2	**13**	**01**	**2**	**07**		**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	13	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan		0					0	
							Jumlah Unit kendaraan dinas opearional atau lapangan yang disediakan	13		0	0	0%	0	0	0%
2	13	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		3					3	
							Jumlah paket mebel yang disediakan	10		0	0	0%	0	0	0%
2	13	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		5					5	
							Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	25		2	2	100%	5	7	28%
2	**13**	**01**	**2**	**08**		**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase Penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**
2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pemenuhan Surat Menyurat		12					12	
							Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	60		12	12	100%	12	24	40%
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12					12	
							Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	180		36	36	100%	36	72	40%
2	13	01	2	08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25	12	5	5	100%	5	22	88%
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12					12	
							Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	780		156	156	100%	156	312	40%
2	13	01	2	09		**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**300%**	**300%**

2	13	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional/Lapangan yang terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan		30					30	
							Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	35		30	30	100%	35	65	186%
2	13	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeler yang terpelihara		0					0	
							Jumlah mebeler yang dipelihara	4		0	0	0%	0	0	0%
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		10					10	
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10		10	10	100%	10	20	200%
2	13	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang terpelihara		0					0	
							Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1		2	2	100%	0	2	200%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dengan Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Blora

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri			10.33	12.18	15.50	19.93	25.09	31.00	10.33	14.39	14.02	19.93	25.09	Renstra 2021-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kamampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Tahun 2025 aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora meliputi:

1. Kepala Dinas 1 orang.
2. Sekretaris Dinas 1 orang.
3. Kasubbag di Sekretariat 2 orang.
4. Kepala Bidang Teknis 3 orang.
5. Sub Koordinator 5 orang.
6. Fungsional Umum 16 orang.

Selain tersebut di atas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2023 semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat desa dan aparatur Pemerintahan Desa secara riil, baik di lapangan maupun di kantor, dengan ditunjang oleh Tenaga PHTL yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebanyak 12 orang.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora

1. Kemandirian dan keberdayan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangnkan hasil-hasil pembangunan
2. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan, hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih terkendala dengan anggaran yang akan dikembangkan didesa nantinya
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun
4. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan desa. Ketersediaan data Profil Desa sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)
5. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah kabupaten terkait Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.
6. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
7. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.

8. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain:

1. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa,
2. Peningkatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa,
3. Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa,
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, memudarnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antaralain disebabkan oleh :

a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari "atas." Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih beriorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.

b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.

c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum dan bukan berdasarkanhasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Blora saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-pilihan (choices) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan.

Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (voices) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (capability deprivation) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya techno-structure maupun soft-structure masyarakat yang adaptif-kreatif dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Blora kedepan.

A. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.

b. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,

c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi prilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,

d. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal,

e. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.

f. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

B. Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain:

a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,

b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib Kabupaten Blora,

c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Indonesia,

d. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora tentang Pemulihan Ekonomi dan Penanggulan Kemiskinan didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar yang termuat dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Blora 2021-2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal yang meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* Peluang) dan Ancaman *Threaths* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
5) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
2) Belum tersedianya sistem informasi data;
3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
3) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
4) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
5) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T):

1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturanperundang-undangan;
2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;

3) Besarnya jumlah keluarga miskin;

4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;

5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.

6) Masih ada desa yang berpotensi rendah.

2.3.5. Formulasi Isu-isu penting

Berdasarkan identifkasi permasalahan, dampak terhadap visi-misi Kepala Daerah peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Blora sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa adalah menjadi isu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan sebagian besar tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Blora masih rendah dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan – peraturan baru baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melihat dari kenyataan ini maka Bidang Pemerintahan Desa mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk memberikan/ melaksanakan pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan monitoring bagi aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Blora;
2. Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ini menjadi tugas penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat desa;
3. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di setiap desa, dimana tugas pokok dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah sebagai pelopor, penggerak, pelaksana teknis, perencanaan partisipatif dan mitra kerja kepala desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa lainnya.;
4. Masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes;
5. Adanya kepala desa dan Perangkat Desa yang baru terpilih dan BPD yang baru terbentuk;

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) 2025 merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora. Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Rancangan Akhir Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah dimuat dalam RKPD Tahun 2025.

Pada Bab ini memuat tentang Proses yang dilakukan dalam membandingkan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025. Dimana pada Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050_5889. Berikut akan di Lampirkan Tabel 2.3 mengenai Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja RKPD Tahun 2025 dan juga Hasil Input pada Aplikasi SIPD Kemendagri yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025

Kabupaten Blora

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rancangan Awal	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
	PROGRAM PENATAAN DESA	Kab.Blora	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**100%**	**2.263.000.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	Kab.Blora	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**100%**	**1.160.500.000**	
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa**	**100 Desa**	**2.263.000.000**	**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA**	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa**	**100 Desa**	**1.160.500.000**	
1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	Kab.Blora	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	100 Unit	2.263.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	Kab.Blora	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	100 Unit	1.160.000.000	APBD dan Bankeu. Prov
						Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Blora	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	50 Desa	500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Kab.Blora	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**100%**	**100.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Kab.Blora	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**100%**	**56.000.000**	
	KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**3 Desa**	**100.000.000**	**KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA**	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**3 Desa**	**56.000.000**	
2	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.500.000	
3	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.000.000	
4	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Blora	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab.Blora	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	39.500.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Kab.Blora**	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik**	**85%**	**4.630.000.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kab.Blora**	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik**	**85%**	**4.310.000.000**	
			Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**10,17%**	**100.000.000**			**Prosentase BUMDes berkembang dan Maju**	**10,17%**	**100.000**	
			Prosentase Desa meningkat stratanya	**11,81%**	**50.000.000**			**Prosentase Desa meningkat stratanya**	**11,81%**	**99.500.000**	
			Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**100%**	**50.000.000**			**Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan**	**100%**	**20.000.000**	

	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**271**	**4.830.000.000**	**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**271**	**4.429.600.000**	
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Dokumen	3.350.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	271 Dokumen	3.200.000.000	BPJS Perangkat Desa
6	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	8 Dokumen	20.000.000	
7	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Blora	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Blora	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	271 Dokumen	10.000.000	
8	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Blora	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	271 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Blora	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	271 Dokumen	100.000.000	
9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Blora	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang	885.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab.Blora	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang	820.000.000	RPL Desa 1 Semester
10	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	90 Dokumen	10.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	0	0	
11	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	40 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	40 Dokumen	100.000	
12	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab.Blora	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	242 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab.Blora	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	242 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pilkades serentak
13	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Blora	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab.Blora	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10 Laporan	10.000.000	
14	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Profil Desa	50 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Profil Desa	50 Dokumen	99.500.000	
15	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	271 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	271 Dokumen	10.000.000	

16	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	16 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	16 Dokumen	18.000.000	
17	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab.Blora	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang	10.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab.Blora	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	271 Orang	2.000.000	
18	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Blora	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	1 Desa	5.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab.Blora	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	1 Desa	40.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Kab.Blora**	**Prosentase PKK Desa aktif**	**100%**	**965.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kab.Blora**	**Prosentase PKK Desa aktif**	**100%**	**999.400.000**	
			Prosentase Posyandu Aktif	**100%**	**50.000.000**			**Prosentase Posyandu Aktif**	**100%**	**75.000.000**	
			Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**64,71%**	**125.000.000**			**Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG**	**64,71%**	**60.000.000**	
	KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**80**	**1.140.000.000**	**KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab.Blora	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**80**	**1.134.400.000**	
19	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	30.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	20.000.000	
20	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Blora	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Blora	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35 Dokumen	20.000.000	
21	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Blora	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab.Blora	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Lembaga	75.000.000	

22	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	4 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab.Blora	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	4 Dokumen	124.400.000	
23	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnolog Tepat Guna	Kab.Blora	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	45 Laporan	75.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Kab.Blora	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	45 Laporan	40.000.000	
24	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Kab.Blora	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	35.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Kab.Blora	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	30.000.000	
25	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5 Dokumen	850.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab.Blora	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	5 Dokumen	825.000.000	Kegiatan PKK
	NON URUSAN					**NON URUSAN**					
	PROGRAM SETIAP SKPD					**PROGRAM SETIAP SKPD**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PMD	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**	**100%**	**5.252.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	DINAS PMD	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**	**100%**	**4.879.500.000**	
	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	DINAS PMD	**Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**2.000.000**	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	DINAS PMD	**Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**1.000.000**	
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS PMD	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS PMD	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 Dokumen	500.000	
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS PMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	500.000	
	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	DINAS PMD	**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	**100%**	**4.040.000.000**	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	DINAS PMD	**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	**100%**	**3.640.150.000**	
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PMD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	4.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS PMD	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	3.600.000.000	GAJI ASN
29	Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DINAS PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	40.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DINAS PMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	40.150.000	Honorarium Penatausahaan Keuangan
	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	DINAS PMD	**Prosentase pemenuhan administrasi umum pada PD**	**100%**	**440.000.000**	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	DINAS PMD	**Prosentase pemenuhan administrasi umum pada PD**	**100%**	**476.350.000**	

30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS PMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS PMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	8.000.000	
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS PMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	10.000.000	
32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINAS PMD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8 Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINAS PMD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8 Paket	5.000.000	
33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS PMD	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Paket	180.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DINAS PMD	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	5 Paket	225.000.000	
34	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS PMD	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS PMD	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	15.000.000	
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS PMD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS PMD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	42.000.000	
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS PMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	171.350.000	
	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	DINAS PMD	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**50.000.000**	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	DINAS PMD	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**62.000.000**	
37	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS PMD	Jumlah Unit kendaraan dinas opearional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS PMD	Jumlah Unit kendaraan dinas opearional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	60.000.000	
38	Pengadaan Mebel	DINAS PMD	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	DINAS PMD	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	0	
39	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS PMD	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS PMD	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	2.000.000	
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DINAS PMD	**Prosentase Penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**465.000.000**	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	DINAS PMD	**Prosentase Penyediaan jasa penunjang**	**100%**	**535.000.000**	
40	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS PMD	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS PMD	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	5.000.000	
41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS PMD	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS PMD	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	170.000.000	
42	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS PMD	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	10.000.000	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS PMD	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	20.000.000	

43	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS PMD	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	156 Laporan	290.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS PMD	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	156 Laporan	340.000.000	Tenaga Keamanan dan Kebersihan
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DINAS PMD	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**255.000.000**	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	DINAS PMD	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**	**100%**	**165.000.000**	
44	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS PMD	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	35 Unit	130.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINAS PMD	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	35 Unit	130.000.000	
45	Pemeliharaan Mebel	DINAS PMD	Jumlah mebeler yang dipelihara	4 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	DINAS PMD	Jumlah mebeler yang dipelihara	4 Unit	5.000.000	
46	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS PMD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS PMD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	15.000.000	
47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS PMD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS PMD	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	
				JUMLAH	**13.585.000.000**				**JUMLAH**	**11.660.000.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berkewajiban juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan. Visi Indonesia Emas 2045 tidak lepas dari adicita pendirinya yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkeanjutan. Segala Upaya pembangunan harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, dituangkan dalam RPJPN 2025 – 2045. Indonesia akan menjadi negara tangguh mandiri, dan inklusif di 2045. Pembangunan 20 Tahun ke depan diharapkan dapat mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern dan sejahtera.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi:

kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Sasaran Utama RPJPN 2025 – 2045 diantaranya :

1. Sasaran Visi 1 "Pendapatan per Kapita setara Negara Maju"

   Pendapatan per Kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 % dan kontribusi PDB Industri pengolahan 28,0 %.

2. Sasaran Visi 2 "Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang"

   Tingkat Kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8%, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan Rasio Gini 0,377 – 0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5%.

3. Sasaran Visi 3 "Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat"

   Penguatan diplomasi Internasional dan Kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Global Power Index masuk ke dalam 15 besar dunia.

4. Sasaran Visi 4 "Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat"

   Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan tekhnologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73.

5. Sasaran Visi 5 "Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission"

   Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 %.

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2025-2045 dituangkan dalam 8 (Delapan) misi Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045, diantaranya :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

   Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

   Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, blue economy, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

   Menciptakan lingkungan Kelembagaan yang dapat menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membnagun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial budaya, menjaga keberlanjutan Sumber Daya Alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

   Meningkatkan Pemerataan dan kualitas pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.

7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

   Menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

   Diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan yang inovatif.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Dalam Delapan misi agenda Pembangunan tersebut diatas dijabarkan kedalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang secara internasional berakhir di tahun 2030. Dari Tujuh belas arah (tujuan) pembangunan nantinya diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan. Untuk Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional tersebut diantaranya :

A. TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1. Transformasi Sosial

IE1 Kesehatan untuk Semua

IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata

IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

IE5 Penerapan Ekonomi Hijau

IE6 Transformasi Digital

IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

IE8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

B. LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial

IE11 Stabilitas Ekonomi Makro

IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas

IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

C. KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan, sebuah kondisi dimana Indonesia memiliki pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan berkurangnya ketimpangan, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumberdaya manusia meningkat, serta intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi menjadi isu penting dalam mencapai visi indonesia emas 2045.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi diperlukan upaya kolaboratif dan sinergitas kebijakan dan program kegiatan antar pemangku kepentingan, antar kementerian lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah dengan mitra pembangunan. Transformasi pembangunan manusia dan kebudayaan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dapat dilakukan melalui konvergensi sinergi program dan kegiatan yang mencakup target atau tujuan lintas sektor, lintas K/L dan overlay-ing lokasi pelaksanaan program/kegiatan, menetapkan target yang reachable, terukur, definitif, tidak bersifat kumulatif/periodik, tagging anggaran yang memadai untuk seluruh bisnis proses pendataan, aksesibilitas data yang inklusif, dan mengoptimalkan peran pendamping desa yang diikuti dengan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi para pendamping desa.

Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu:

a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Dinas Usaha Milik Desa.

e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Berdasarkan 8 (delapan) agenda pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Blora menjabarkan kedalam visi misi dan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah :

"Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing".

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 yang memuat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misinya utamanya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan mendukung misi No 5, yaitu **"Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan",** dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan diantaranya :

1. Fasilitasi dan Penguatan BUMDes;
2. Ngopi Bareng pada kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong;
3. Bantuan Keuangan kepada Desa Maju dan Desa Mandiri melalui Status Indeks Desa Membangun;
4. Memfasilitasi pendampingan dan konsultasi hukun aparatur pemerintah desa;
5. Memfasilitasi pemerintah desa dalam pengisian perangkat desa;
6. Insentif RT, RW, dan Linmas dalam Alokasi Dana Desa.

Mengacu pada kebijakan umum pada RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Program yang tertuang diantaranya :

1. Program Penataan Desa.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Disamping ke 5 Program diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga melaksanakan Fasilitasi untuk Belanja Transfer yang meliputi Belanja Bantuan Keuangan yang ada pada PPKD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa serta kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blora selama lima tahun kedepan (2021-2026) harus sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

"Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing"

Visi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu sebagai berikut :

1. Sesarengan Mbangun Blora

   Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensidan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimanaterlihat pada gambar berikut ini.

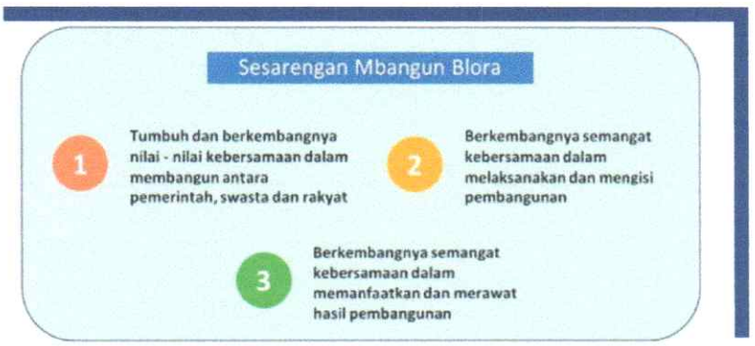

2. Unggul

   Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdayamanusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

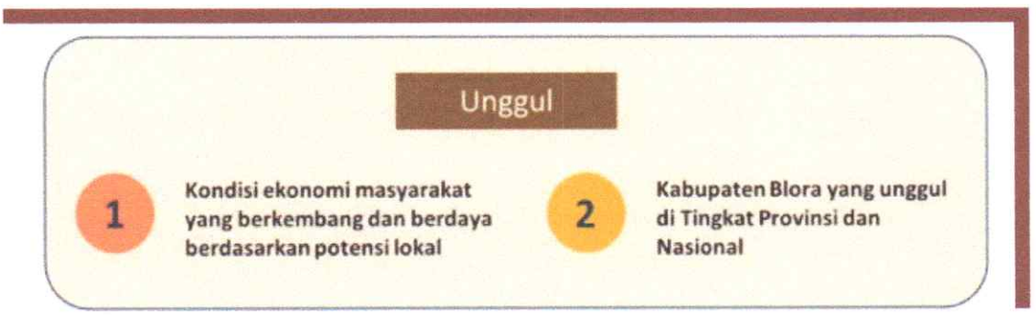

3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

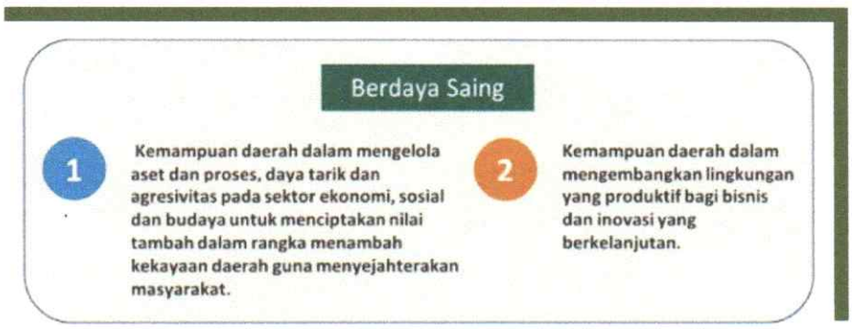

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blora "Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing", maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026) yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misi utamanya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Misi yang menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan implementasi atas misi Nomor 5, yaitu:

"Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan",

dilaksanakan dengan mengimplementasikan program prioritas sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Mulai Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa untuk Program Sarjana dengan telah dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora dan Universitas Negeri Semarang tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pengembangan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa

di Kabupaten Blora Nomor: 10/ BPSDM/ HKM.07.01/ III/2023, Nomor: 421.53/1088, dan Nomor: T/2955/UN37/KS/2023. Dalam isi Nota Kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa, Pemerintah Kabupatem Blora menyiapkan dan memberikan Beasiswa Pendidikan dalam bentuk Subsidi 50% Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 2.700.000,- dari keseluruhan Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 5.400.000,- per mahasiswa/per semester yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora selama 3 tahun anggaran atau 4 semester. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah dianggaran Semester 1 sebesar Rp. 810.000.000,-. Dan untuk Tahun Anggaran 2024 Semester 2 dan 3 akan diperlukan anggaran sebesar Rp. 1.620.000.000,-. Kemudian Untuk Tahun 2025 Semester 4 akan dibutuhkan Anggaran sebesar Rp. 810.000.000,-.

Untuk merealisasikan misi dimaksud, maka perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah sebagai penunjang misi tersebut. Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora termuat dalam RPJMD Kabupaten Blora dan Renstra Dinas PMD Kab. Blora Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2025
Meningkatnya Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	0.6525
	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	25.09%
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Nilai Sakip Perangkat Daerah	78.95
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Umum Perkantoran yang mendukung pencapaian skor sakip	100%

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam rangka mencapai Visi dan Misi adalah :

Tujuan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah:

"Meningkatnya Kemandirian Desa"

Dengan tujuan tersebut ditentukan pula indikator tujuan yakni *"Indeks Desa Membangun"*.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan agar tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan misi yang ditetapkan. Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran strategis yaitu :

"Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri"

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah *"Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri"*.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada dasarnya program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

   a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b) Pencapaian SDGs,
   c) P engentasan kemiskinan,
   d) Pencapaian NSPK dan SPM,
   e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   f) Pengembangan daerah terisolir,
   g) Dsb

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025

   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 merencanakan 5 Program, 10 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang termasuk dalam Belanja Langsung. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD dan 4 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Total Pagu yang diberikan Untuk Tahun 2025 dan telah di Input pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri tahap pra-RKA Rankhir Renja RKPD adalah Rp. 11.660.000.000,-.

Akan tetapi dari Pagu yang diberikan masih terdapat beberapa Sub Kegiatan yang masih butuh banyak dukungan anggaran, untuk itu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora telah mengirimkan Nota Dinas Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2025 Nomor: 900/240/2024 Tanggal 24 April 2024 dengan mengusulan penambahan pagu Rp. 1.500.000.000,- dengan rincian yang sudah dijelaskan pada Nota Dinas tersebut.

Bisa dilihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora, diantaranya adalah yang Pertama mulai Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa untuk Program Sarjana dengan telah dibuat Nota Kesepahaman antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Blora dan Universitas Negeri Semarang tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pengembangan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa di Kabupaten Blora Nomor: 10/ BPSDM/ HKM.07.01/ III/2023, Nomor: 421.53/1088, dan Nomor: T/2955/UN37/KS/2023. Dalam isi Nota Kesepahaman tersebut dijelaskan bahwa, Pemerintah Kabupatem Blora menyiapkan dan memberikan Beasiswa Pendidikan dalam bentuk Subsidi 50% Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 2.700.000,- dari keseluruhan Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp. 5.400.000,- per mahasiswa/per semester yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora selama 3 tahun anggaran atau 4 semester. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 telah dianggaran Semester 1 sebesar Rp. 810.000.000,-. Dan untuk Tahun Anggaran 2024 Semester 2 dan 3 akan diperlukan anggaran sebesar Rp. 1.620.000.000,-. Kemudian Untuk Tahun 2025 Semester 4 akan dibutuhkan Anggaran sebesar Rp. 810.000.000,-.

Kemudian Yang Kedua adalah Pelaksanaan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora diantaranya adalah melakukan Pembinaan dan Evaluasi terhadap pencatatan dan update data (Profil Desa, Indeks Desa Membangun, SDG's) dan Informasi Desa. Perlu diketahui Tahun 2023 IDM Kabupaten Blora memperoleh rata-rata 0,6693 dan Jumlah Desa Mandiri 4, Desa Maju 34, Desa Berkembang 226, Desa Tertinggal 7.

Yang Ketiga Kegiatan Fasilitasi terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD). Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. P3PD dilaksanakan oleh 4 (empat) kementerian dan lembaga. Keempat Kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas). P3PD diarahkan untuk hal – hal sebagai berikut : (1) mendorong efisiensi dan efektifitas penguatan desa, melalui pengembangan dan peningkatan sistem dukungan. (2) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. (3) reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien; penguatan data, pengembangan sistem monitoring dan pelaporan, serta umpanbalik yang efektif. (4) membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah. (5) adanya inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital. P3PD bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa di lokasi program.

Yang Keempat terkait dengan usulan THR (Tunjangan Hari Raya) bagi Perangkat Desa pada Alokasi Dana Desa Tahun 2025. Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa saat ini sejumlah 2885 orang, sedangkan jabatan yang masih kosong dan belum terisi sejumlah 243 orang. Berdasarkan hasil Rapat rencana pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan pembahasan Peraturan Bupati Blora tentang perubahan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Rincian besaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai berikut :

A. Total kebutuhan PAGU THR sebesar **Rp. 6.286.501.340,- (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	PAGU THR	TOTAL
1	KEPALA DESA	271	3.500.000	948.500.000
2	SEKRETARIS DESA	257	2.224.420	571.675.940
3	KEPALA URUSAN	736	2.022.200	1.488.339.200
4	KEPALA SEKSI	736	2.022.200	1.488.339.200
5	KEPALA DUSUN	813	2.022.200	1.644.048.600
6	NON JOB	72	2.022.200	145.598.400
	JUMLAH TOTAL	**2885**		**6.286.501.340**

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	Kabupaten Blora	100%	1.160.500.000	PAD, DAU, DBH & BANKEU PROV	TMMD yg Tercin dan APBD dan Bankeu. Prov	100%	1.500.000.000
2	13	02	2	01		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa	Kabupaten Blora	100 Desa	1.160.500.000	PAD, DAU, DBH & BANKEU PROV		100 Desa	1.500.000.000
2	13	02	2	01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Blora	100 Unit	1.160.000.000	PAD, DAU, DBH		100 Unit	1.500.000.000
2	13	02	2	01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kabupaten Blora	50 Desa	500.000	PAD, DAU, DBH		50 Desa	100.000.000
2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi	Kabupaten Blora	100%	56.000.000	PAD, DAU, DBH		100%	450.000.000
2	13	03	2	01		KEGIATAN FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa	Kabupaten Blora	3 Desa	56.000.000	PAD, DAU, DBH		3 Desa	450.000.000
2	13	03	2	01	01	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Blora	1 Dokumen	8.500.000	PAD, DAU, DBH		1 Dokumen	125.000.000
2	13	03	2	01	02	Fasilitasi Kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Blora	1 Dokumen	8.000.000	PAD, DAU, DBH		1 Dokumen	125.000.000
2	13	03	2	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Blora	1 Dokumen	39.500.000	PAD, DAU, DBH		1 Dokumen	200.000.000
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik	Kabupaten Blora	85%	4.310.000.000	PAD, DAU, DBH		90%	5.175.000.000
							Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	Kabupaten Blora	10,17%	100.000	PAD, DAU, DBH		11,86%	175.000.000
							Prosentase Desa meningkat stratanya	Kabupaten Blora	11,81%	99.500.000	PAD, DAU, DBH		16,97%	125.000.000
							Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	Kabupaten Blora	100%	20.000.000	PAD, DAU, DBH		100%	300.000.000
2	13	04	2	01		KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Kabupaten Blora	271	4.429.600.000	PAD, DAU, DBH		271 Desa	5.775.000.000
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Blora	271 Dokumen	3.200.000.000	PAD, DAU, DBH	BPJS Perangkat Desa	271 Dokumen	3.500.000.000
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Blora	8 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH		8 Dokumen	300.000.000
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Blora	271 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH		271 Dokumen	150.000.000
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Blora	271 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH		271 Dokumen	275.000.000

2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Blora	271 Orang	620.000.000	PAD, DAU, DBH	RPL Desa 1 Semester	271 Orang	500.000.000
2	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Blora	0	0	PAD, DAU, DBH		95 Dokumen	125.000.000
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kabupaten Blora	40 Dokumen	100.000	PAD, DAU, DBH		40 Dokumen	175.000.000
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Blora	242 Laporan	100.000.000	PAD, DAU, DBH	Fasilitasi Pilkades serentak	0 Dokumen	0
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Blora	10 Laporan	10.000.000	PAD, DAU, DBH		10 Laporan	100.000.000
2	13	04	2	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Blora	50 Dokumen	99.500.000	PAD, DAU, DBH		60 Dokumen	125.000.000
2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	Kabupaten Blora	271 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH		271 Dokumen	175.000.000
2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Blora	16 Dokumen	18.000.000	PAD, DAU, DBH		16 Dokumen	125.000.000
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Blora	271 Orang	2.000.000	PAD, DAU, DBH		271 Orang	125.000.000
2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Kabupaten Blora	1 Desa	40.000.000	PAD, DAU, DBH		1 Desa	100.000.000
2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Prosentase PKK Desa aktif**	**Kabupaten Blora**	**100%**	**999.400.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**1.175.000.000**
							Prosentase Posyandu Aktif	**Kabupaten Blora**	**100%**	**75.000.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**100.000.000**
							Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**Kabupaten Blora**	**64,71%**	**60.000.000**	**PAD, DAU, DBH**		**78,47%**	**300.000.000**
2	**13**	**05**	**2**	**01**		**KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**Kabupaten Blora**	**80 Desa**	**1.134.400.000**	**PAD, DAU, DBH**		**85 Desa**	**1.675.000.000**
2	13	05	2	01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Blora	3 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH		3 Dokumen	50.000.000
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Blora	35 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH		40 Dokumen	150.000.000
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kabupaten Blora	5 Lembaga	75.000.000	PAD, DAU, DBH		5 Lembaga	100.000.000
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Kabupaten Blora	4 Dokumen	124.400.000	PAD, DAU, DBH		4 Dokumen	175.000.000

2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	Kabupaten Blora	45 Laporan	40.000.000	PAD, DAU, DBH		55 Laporan	150.000.000
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Blora	1 Laporan	30.000.000	PAD, DAU, DBH		1 Laporan	100.000.000
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kabupaten Blora	5 Dokumen	825.000.000	PAD, DAU, DBH	Kegiatan PKK	5 Dokumen	850.000.000
2	**13**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**	**Dinas PMD**	**100%**	**4.879.500.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**5.440.000.000**
2	**13**	**01**	**2**	**01**		**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase penyusunan perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas PMD**	**100%**	**1.000.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**10.000.000**
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Dinas PMD	3 Dokumen	500.000	PAD, DAU, DBH		3 Dokumen	5.000.000
2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMD	7 Laporan	500.000	PAD, DAU, DBH		7 Laporan	5.000.000
2	**13**	**01**	**2**	**02**		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan PD**	**Dinas PMD**	**100%**	**3.640.150.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**3.550.000.000**
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMD	30 Orang/Bulan	3.600.000.000	PAD, DAU, DBH	GAJI ASN	30 Orang/Bulan	3.500.000.000
2	13	01	2	02	02	Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNA	Dinas PMD	3 Dokumen	40.150.000	PAD, DAU, DBH	Honorarium Penatausahaan Keuangan	3 Dokumen	50.000.000
2	**13**	**01**	**2**	**06**		**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase pemenuhan administrasi umum pada PD**	**Dinas PMD**	**100%**	**476.350.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**555.000.000**
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas PMD	8 Paket	8.000.000	PAD, DAU, DBH		10 Paket	10.000.000
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas PMD	5 Paket	10.000.000	PAD, DAU, DBH		5 Paket	50.000.000
2	13	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas PMD	8 Paket	5.000.000	PAD, DAU, DBH		8 Paket	5.000.000
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas PMD	5 Paket	225.000.000	PAD, DAU, DBH		5 Paket	200.000.000
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas PMD	5 Paket	15.000.000	PAD, DAU, DBH		5 Paket	40.000.000
2	13	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas PMD	3 Dokumen	42.000.000	PAD, DAU, DBH		3 Dokumen	50.000.000
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMD	200 Laporan	171.350.000	PAD, DAU, DBH		200 Laporan	200.000.000
2	**13**	**01**	**2**	**07**		**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang**	**Dinas PMD**	**100%**	**62.000.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**310.000.000**
2	13	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Dinas PMD	2 Unit	60.000.000	PAD, DAU, DBH		1 Unit	250.000.000
2	13	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Dinas PMD	0	0	PAD, DAU, DBH		2 Unit	10.000.000
2	13	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dinas PMD	5 Unit	2.000.000	PAD, DAU, DBH		5 Unit	50.000.000
2	**13**	**01**	**2**	**08**		**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase Penyediaan jasa penunjang**	**Dinas PMD**	**100%**	**535.000.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**630.000.000**

2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMD	12 Laporan	5.000.000	PAD, DAU, DBH		12 Laporan	10.000.000
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas PMD	36 Laporan	170.000.000	PAD, DAU, DBH		36 Laporan	200.000.000
2	13	01	2	08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas PMD	5 Laporan	20.000.000	PAD, DAU, DBH		5 Laporan	20.000.000
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	Dinas PMD	156 Laporan	340.000.000	PAD, DAU, DBH	Tenaga Keamanan dan Kebersihan	156 Laporan	400.000.000
2	**13**	**01**	**2**	**09**		**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**	**Dinas PMD**	**100%**	**165.000.000**	**PAD, DAU, DBH**		**100%**	**385.000.000**
2	13	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Dinas PMD	35 Unit	130.000.000	PAD, DAU, DBH		35 Unit	200.000.000
2	13	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler yang dipelihara	Dinas PMD	4 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH		4 Unit	15.000.000
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas PMD	10 Unit	15.000.000	PAD, DAU, DBH		10 Unit	20.000.000
2	13	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas PMD	1 Unit	15.000.000	PAD, DAU, DBH		1 Unit	150.000.000
									TOTAL	**11.650.000.000**				**14.740.000.000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

4.1 Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 merencanakan 5 Program, 10 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan yang termasuk dalam Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD dan 4 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Total Pagu yang diberikan Untuk Tahun 2025 dan telah di Input pra-RKA Rankhir Renja RKPD pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri adalah Rp. 11.660.000.000,-.

Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, maka sasaran tersebut tertuang dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disusun atau diinput pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari :
     a. Penyusunan Dokumen Perencanaan
     b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Program Penataan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- Penyelenggaraan Penataan Desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
  b. Fasilitasi Tata Wilayah Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan terdiri dari :

- Fasilitasi Kerjasama antar desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
  b. Fasilitasi kerjasama antar desa dgn pihak ketiga dalam kab/kota
  c. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan terdiri dari :

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
  c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  e. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
  g. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  h. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  i. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  j. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
  k. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
  l. Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD
  m. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan terdiri dari :
  a. Identifikasi dan Inventarsiasi Masyarakat Hukum Adat
  b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna
  f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  g. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

  Pada Tahun 2025 Total Pagu yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora Untuk Tahun 2025 dan telah di Input tahap pra-RKA Rankhir Renja RKPD pada Aplikasi SIPD-RI Kemendagri adalah Rp. 11.660.000.000,-.

  Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora juga mengawal dan memfasilitasi untuk Belanja Transfer yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten nantinya setelah Penetapan akan masuk pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA

ARIEF ROHMAN

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Penyusunan Renja didasarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PMD

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720623 199101 2 001

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 000.1.1/ 38 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dimaksud;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

a. menyusun dan menyajikan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025;
b. melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025;
c. melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyediaan bahan diskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora dalam rangka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah atas rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025;
d. menyusun, menyajikan dan membahas rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025;
e. menyusun, menyajikan dan membahas rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2025; dan
f. melakukan koordinasi penetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2-1-2024

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora;
5. Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 000775 38 /2024
TANGGAL : 2 - 1 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
4.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang ditunjuk	Anggota	2 (dua) orang

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**11.660.000.000,00**							**14.705.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.660.000.000,00**							**14.705.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**11.660.000.000,00**							**14.705.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan urusan penunjang pemerintahan daerah***	-			**100 %**	**4.879.500.000,00**						-	**5.430.000.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	1.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora	-	10.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	500.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		5.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	500.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		5.000.000,00	DINAS PI MASYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	3.640.150.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora	-	3.550.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	3.600.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		3.500.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAI
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	40.150.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		50.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase pemenuhan administrasi umum pada Perangkat Daerah*	-			100 %	476.350.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora	-	555.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA PENA
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	8.000.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		10.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.000.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		50.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAI
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	5.000.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		5.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	225.000.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		200.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		40.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		50.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	171.350.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		200.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	62.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora	-	300.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	60.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		250.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		50.000.000,00	DINAS PI MASYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase Penyediaan jasa penunjang*	-			100 %	535.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora	-	630.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		10.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	170.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		200.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		20.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				156 Laporan	340.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		400.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase barang milik daerah yang terpelihara*	-			100 %	165.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora	-	385.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	130.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		200.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	5.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		15.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA PENA
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		20.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Dinas PMD Kab. Blora		150.000.000,00	DINAS P MASYAR
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	***Persentase kegiatan pembangunan desa yang terselenggara dengan baik***	-			**100 %**	**1.160.500.000,00**						-	**1.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA PENA
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa*	-			100 Desa	1.160.500.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora	-	1.600.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				50 Desa	500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				100 Unit	1.160.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		1.500.000.000,00	DINAS PI MASYAR
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	***Prosentase kerjasama desa yang terfasilitasi***	-			**100 %**	**56.000.000,00**						-	**450.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat dokumen kerjasama antar desa*	-			3 Desa	56.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora	-	450.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAI
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.500.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		125.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.000.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		125.000.000,00	DINAS P MASYAR
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERA PENA
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	39.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		200.000.000,00	DINAS P MASYAR
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Prosentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik*** ***Prosentase desa meningkat stratanya*** ***Prosentase produk hukum tentang desa yang ditetapkan*** ***Prosentase BUMDes yang berkembang dan maju***	-			**90 %** **16,97 %** **100 %** **11,86 %**	**4.429.600.000 00**						-	**5.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa*	-			271 Desa	4.429.600.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora	-	5.650.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				271 Dokumen	3.200.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		3.500.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				8 Dokumen	20.000.000.00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		300.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				271 Dokumen	10.000.000 00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		150.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				271 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		275.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				271 Orang	820.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		500.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				40 Dokumen	100.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		175.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				242 Laporan	100.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		0,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				10 Laporan	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				60 Dokumen	99.500.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		125.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				271 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		175.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				16 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		125.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				271 Orang	2.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		125.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				1 Desa	40.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PI MASYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG*** ***Prosentase PKK desa aktif*** ***Prosentase Posyandu aktif***	-			**76,47 %** **100 %** **100 %**	**1.134.400.000,00**						-	**1.575.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat*	-			85 Desa	1.134.400.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora	-	1.575.000.000,00	DINAS PE MASYAR
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	20.000.000 00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		50.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.05 2 01 0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				40 Dokumen	20.000.000 00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		150.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAI
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	75.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				4 Dokumen	124.400.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		175.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				55 Laporan	45.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		150.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		100.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAI PENAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	825.000.000,00	Kab. Blora, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdayasaing dan pengurangan kemiskinan	Desa di Kabupaten Blora		850.000.000,00	DINAS PI MASYAR
	JUMLAH							**11.660.000.000,00**							**14.705.000.000,00**	

FORMULIR VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas PMD

Nama Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Nama Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Kerja Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat/Kecamatan Dinas PMD*) Kabupaten Blora Tahun 2025 sebagaimana terlampir telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas/Badan/Kantor/Sekretariat/Kecamatan .....*) berdasarkan hasil verifikasi pada tabel berikut:

Tabel Penilaian Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

No.	Aspek Penilaian	Verifikasi**)		Catatan Penyempurnaan
		Ada / Sesuai	Tidak Ada / Tidak Sesuai	
A.	**Sistematika Dokumen**			
1.	Bab I Pendahuluan			
	1.1 Latar Belakang	✓		
	1.2 Landasan Hukum	✓		
	1.3 Maksud dan Tujuan	✓		
	1.4 Sistematika Penulisan	✓		
2.	Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	✓		
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	✓		
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓		
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	✓		
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	✓		
3.	Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	✓		
4.	Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah			
	Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	✓		
5.	Bab V Penutup	✓		
B.	**Kesesuaian dengan SIPD**			
	- Nomenklatur Urusan	✓		
	- Nomenklatur Bidang Urusan	✓		
	- Nomenklatur Program	✓		
	- Nomenklatur Kegiatan	✓		
C.	**Format Penulisan**			
	- Jenis Font (Bookman Old Style)	✓		
	- Ukuran Font (12 pt untuk paragraf)	✓		
	- Spasi (1,15, before 6pt, after 6pt)	✓		
	- Heading	✓		
D	**Tambahan Inovasi OPD**		✓	
E	**Indikator dan Target Renja dalam SIPD Terisi (kolom 4,5,6,7,8)**	✓		

Keterangan:

*) beri tanda √ untuk kolom yang sesuai

**) sesuaikan dengan nama Perangkat Daerah

Blora, 2024

Disetujui oleh

Kepala Bidang .....

.....

Pangkat

NIP

Diverifikasi oleh

Sub Koordinator Kesehatan & PMD

Nailatul Muayyadah, S.Si, M.A

.....

Pangkat

NIP. 198708192011012010.

Penjelasan Atas Catatan Penyempurnaan

Rancangan Akhir belum mencantumkan poin tambahan inovasi OPD.

Diverifikasi Oleh,
Sub Koordinator Kesehatan & PMD

Nailatul Muayyadah

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

Pada hari kamis tanggal sebelas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Aula Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Blora, telah diselenggarakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dihadiri oleh unsur Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025;

2. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 telah sesuai dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025;

2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2025;

3. Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2025, telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima hasil verifikasi,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720623 199101 2 001

Blora, 11 Juli 2024
Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Bappeda Kabupaten Blora

GANIS CAHYO UTOMO, SH., MM
Penata Tk. I
NIP. 19850630 200903 1 006

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kabupaten Blora,

A. MAHBUB DJUNAIDI, S.Pd., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660311 198603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. GOR No. 10 Telp. (0296)531827 Blora 58219

TANDA TERIMA

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, menerima Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025, dari Dinas PMD, pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli, Tahun 2024 dengan kelengkapan.

Kelengkapan	Checklist
Cetak	
1. Berita Acara Pengumpulan	✓
2. Dokumen Renja yag telah disempurnakan	✓
Softfile	
1. PDF beserta scan BA (dalam 1 File)	✓
2. Word	✓
Nomor dan Format Lampiran Sesuai	✓

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Blora, 15 Juli 2024
Penerima

(Kartiten.)